



GAYA KEPEMIMPINAN PRABOWO SUBIANTO: ANALISIS DARI PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN MILITER KE KEPEMIMPINAN SIPIL

Deffynta Octavyana Ayu Saputri, Dadan Kurniansyah, Mochamad Faizal Rizki

Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan Prabowo Subianto dengan menelusuri transformasinya dari pola komando kepemimpinan militer menuju kepemimpinan sipil dalam sistem demokrasi Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus, dengan kerangka teori kepemimpinan transformasional (Bass, 1985; Bass & Avolio, 1994) yang dipadukan dengan konsep relasi sipil-militer, khususnya gagasan kontrol sipil objektif dan subjektif (Huntington, 1957) serta literatur relasi sipil-militer Indonesia pascareformasi (Mietzner, 2008, 2012; Kardi, 2015; Gunawan, 2017; Soesilo, 2014). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap jurnal ilmiah dan buku akademik mengenai kepemimpinan serta relasi sipil-militer di Indonesia, dilengkapi dokumentasi pemberitaan media massa nasional dan rilis resmi kelembagaan negara untuk memverifikasi empat peristiwa kepemimpinan kunci pada masa awal pemerintahan 2024-2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prabowo Subianto secara konsisten mentransplantasikan nilai disiplin, kohesi komando, dan orientasi hasil khas institusi militer ke dalam tata kelola kabinet sipil, tampak pada retret pembekalan kabinet di lingkungan Akademi Militer, pelibatan struktur TNI dalam program kebijakan sosial, serta gaya komunikasi asertif yang menegaskan otoritas tunggal kepresidenan. Di sisi lain, ditemukan pula kecenderungan adaptif berupa akomodasi politik, konsultasi lintas generasi kepemimpinan nasional, dan keterbukaan terhadap kritik publik yang menjadi penanda pergeseran menuju kepemimpinan sipil-demokratis. Simpulan penelitian menegaskan bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto merepresentasikan model kepemimpinan transisional yang memadukan disiplin hierarkis ala militer dengan tuntutan akuntabilitas dan partisipasi khas pemerintahan sipil, sekaligus menyisakan sejumlah persoalan batas kewenangan sipil-militer yang relevan dengan diskursus akademik mengenai konsolidasi demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Prabowo Subianto, Kepemimpinan Militer, Kepemimpinan Sipil, Relasi Sipil-Militer.

PENDAHULUAN

Pergantian kepemimpinan nasional Indonesia pada Oktober 2024 menghadirkan sebuah fenomena kepemimpinan yang distingtif: naiknya seorang purnawirawan jenderal dengan rekam jejak lebih dari dua dekade berkarier di lingkungan komando militer menjadi kepala negara dalam sistem presidensial demokratis. Prabowo Subianto, yang sebelumnya menjabat Menteri Pertahanan periode 2019-2024, dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia kedelapan setelah menempuh tiga kali kontestasi pemilihan presiden pada 2009, 2014, dan 2019 (Media Indonesia, 2025). Perjalanan karier yang bermula dari Akademi Militer hingga puncak kekuasaan eksekutif ini menjadikan pola kepemimpinannya sebagai objek kajian yang relevan untuk membedah bagaimana nilai, kebiasaan, dan struktur berpikir militeristik berinteraksi dengan tuntutan kepemimpinan sipil yang partisipatif dan akuntabel.

Diskursus akademik mengenai relasi sipil-militer di Indonesia pascareformasi 1998 sesungguhnya telah berkembang cukup mapan. Mietzner (2008, 2012) misalnya menunjukkan bahwa sejak konsolidasi politik sipil menguat pasca-2004, kekuatan militer Indonesia cenderung termarginalkan dari pusat kekuasaan, meskipun sejumlah aktor purnawirawan tetap mempertahankan pengaruh melalui jalur elektoral. Kardi (2015) menambahkan bahwa demokratisasi relasi sipil-militer di Indonesia belum sepenuhnya tuntas karena dua faktor: profesionalisme militer yang belum sepenuhnya terwujud, dan

kepemimpinan sipil yang masih relatif lemah dalam mengontrol institusi keamanan. Sementara itu, Soesilo (2014) mengungkapkan bahwa purnawirawan TNI yang masuk ke ranah politik praktis justru banyak berperan sebagai agen peredam konflik antara elite sipil dan militer, bukan semata perpanjangan kepentingan institusional militer. Naiknya Prabowo Subianto, seorang purnawirawan jenderal dengan rekam jejak lebih dari dua dekade berkarier di lingkungan komando militer, sebagai Presiden Republik Indonesia kedelapan pada Oktober 2024 menjadi kasus mutakhir yang relevan untuk menguji proposisi-proposisi teoretis tersebut dalam konteks kepemimpinan nasional tertinggi.

Sejak awal masa transisi pemerintahan, publik dan pengamat politik mencermati kecenderungan Prabowo Subianto mempertahankan sejumlah elemen kepemimpinan bercorak komando dalam praktik pemerintahan sipil. Salah satu indikasi awal tampak pada penyelenggaraan retret pembekalan bagi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di lingkungan Akademi Militer (Akml) Magelang tak lama setelah pelantikan, di mana para menteri mengikuti kegiatan baris-berbaris, olahraga pagi, dan pembekalan materi kenegaraan dengan pola disiplin ala pendidikan militer (Kompas.com, 2024). Fenomena ini menegaskan bahwa gaya kepemimpinan Prabowo Subianto tidak sepenuhnya lepas dari sosialisasi institusional yang ia jalani selama puluhan tahun di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, sejalan dengan temuan Gunawan (2017) bahwa kontrol sipil atas militer di Indonesia pascaOrde

Baru masih diwarnai oleh persilangan budaya organisasi antara kedua ranah tersebut.

Di sisi lain, sebagai kepala negara yang lahir dari proses elektoral demokratis, Prabowo Subianto juga dituntut menampilkan kualitas kepemimpinan sipil, seperti keterbukaan terhadap konsultasi lintas generasi kepemimpinan nasional, kesediaan menghadapi kritik publik, dan akomodasi terhadap dinamika koalisi politik. Ia secara terbuka menyatakan kebiasaannya berkonsultasi dengan presiden-presiden terdahulu lintas partai sebagai bagian dari kearifan kepemimpinan, sembari menegaskan independensinya sebagai kepala pemerintahan yang berdaulat penuh atas keputusannya sendiri (Kompas.id, 2025). Ketegangan antara warisan komando militer dan tuntutan demokrasi sipil inilah yang menjadi titik tolak analisis dalam penelitian ini.

Kajian mengenai gaya kepemimpinan Prabowo Subianto sesungguhnya telah cukup banyak dilakukan dalam literatur ilmu politik dan komunikasi, terutama yang membandingkannya dengan presiden-presiden lain atau yang berfokus pada dimensi personal branding dan strategi komunikasi politiknya (Rengifurwarin, 2014; Husain, 2025). Sementara itu, kajian mengenai keterlibatan aparatur militer dalam jabatan dan program sipil pascareformasi juga telah dilakukan dalam konteks yang lebih umum, tanpa secara khusus mengaitkannya dengan gaya kepemimpinan personal seorang presiden dengan latar belakang militer (Syahrul & Goncing, 2020). Penelitian yang secara spesifik memadukan kerangka kepemimpinan transformasional dengan literatur relasi sipil-militer Indonesia untuk membedah praktik kepemimpinan Prabowo Subianto pascapelantikan sebagai presiden masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis secara deskriptif bagaimana dimensi kepemimpinan militer dan kepemimpinan sipil berinteraksi dalam praktik kepemimpinan Prabowo Subianto, dengan menggunakan kerangka kepemimpinan transformasional (Bass, 1985; Bass & Avolio, 1994) yang dipadukan dengan konsep relasi sipil-militer (Huntington, 1957; Mietzner, 2008, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam pola kepemimpinan Prabowo Subianto dalam konteks transisi dari institusi militer ke pemerintahan sipil. Kerangka teoretis yang digunakan memadukan dua perspektif utama. Pertama, teori kepemimpinan transformasional yang menekankan kemampuan pemimpin memotivasi dan menggerakkan pengikut melampaui kepentingan pribadi demi tujuan kolektif organisasi melalui pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan perhatian individual (Bass, 1985; Bass & Avolio, 1994). Kedua, konsep relasi sipil-militer yang dikembangkan Huntington (1957), khususnya pembedaan antara kontrol sipil subjektif (*subjective civilian control*), yaitu memaksimalkan kekuasaan kelompok sipil tertentu atas militer, dan kontrol sipil objektif (*objective civilian control*), yaitu memaksimalkan profesionalisme militer sehingga institusi tersebut secara sukarela tunduk pada otoritas sipil. Kerangka ini diperkaya dengan literatur relasi sipil-militer Indonesia pascareformasi, termasuk kajian mengenai marginalisasi politik militer (Mietzner, 2012), keterlibatan purnawirawan dalam politik praktis (Soesilo, 2014), demokratisasi relasi sipil-militer (Kardi, 2015), kontrol sipil atas kebijakan pertahanan (Gunawan,

2017), dan penempatan personel militer pada jabatan sipil (Syahrul & Goncing, 2020).

Subjek penelitian ini adalah figur Prabowo Subianto, dengan fokus amatan pada praktik kepemimpinannya selama periode awal pemerintahan, yaitu Oktober 2024 hingga pertengahan 2026. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposif, dengan memilih empat peristiwa kepemimpinan yang dinilai representatif, yaitu: (1) penyelenggaraan retreat pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang; (2) pernyataan tegas "bukan presiden boneka" dalam Sidang Kabinet Paripurna; (3) pelibatan struktur TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis; dan (4) pola diplomasi personal serta rekonsiliasi politik lintas kubu pascapemilu yang ia tempuh sejak masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan hingga awal masa kepresidenan.

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua kategori. Sumber primer berupa data kepustakaan akademik, yaitu jurnal ilmiah terindeks dan buku-buku ilmiah mengenai teori kepemimpinan serta relasi sipil-militer di Indonesia (Bass, 1985; Huntington, 1957; Mietzner, 2008, 2012; Kardi, 2015; Gunawan, 2017; Soesilo, 2014; Rengifurwarin, 2014; Husain, 2025; Syahrul & Goncing, 2020), termasuk catatan reflektif Prabowo Subianto sendiri mengenai filosofi kepemimpinan militer yang dituangkan dalam bukunya *Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman* (Subianto, 2021, 2022) sebagai sumber data primer mengenai cara pandang subjek penelitian terhadap kepemimpinan. Sumber sekunder berupa dokumentasi pemberitaan media massa nasional arus utama dan rilis resmi lembaga kepresidenan yang digunakan secara terbatas untuk memverifikasi kronologi dan fakta empat peristiwa kepemimpinan yang dikaji,

mengingat peristiwa-peristiwa tersebut berlangsung pada 2024-2026 dan belum banyak dibahas dalam jurnal akademik yang terbit dengan tenggat waktu penerbitan yang lebih panjang.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik dengan mengelompokkan setiap peristiwa ke dalam tiga dimensi kajian, yaitu: dimensi struktural-organisasional (bagaimana pola komando ditransplantasikan ke tata kelola kabinet, dianalisis dengan kerangka Huntington, 1957 dan Gunawan, 2017), dimensi komunikatif (bagaimana gaya bicara dan sikap otoritatif ditampilkan di ruang publik, dianalisis dengan kerangka kepemimpinan transformasional Bass, 1985), dan dimensi kebijakan (bagaimana pendekatan militeristik memengaruhi desain dan implementasi program pemerintahan, dianalisis dengan kerangka Mietzner, 2012 dan Syahrul & Goncing, 2020).

Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari literatur akademik dengan pemberitaan media massa serta rilis resmi pemerintah, guna memastikan objektivitas dan menghindari bias sepihak dalam interpretasi data (Arikunto, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis terhadap empat klaster peristiwa kepemimpinan Prabowo Subianto pada awal masa pemerintahannya, ditemukan pola yang konsisten berupa perpaduan antara warisan kepemimpinan komando militer dan adaptasi terhadap tuntutan kepemimpinan sipil-demokratis. Setiap klaster merefleksikan dimensi teoretis yang saling melengkapi sebagaimana diuraikan berikut ini.

**Transplantasi Budaya
Komando Militer ke Tata Kelola**

Kabinet: Retret Akademi Militer Magelang

Peristiwa paling awal yang menandai gaya kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan sipil adalah penyelenggaraan retret pembekalan bagi 136 anggota Kabinet Merah Putih di lingkungan Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 24-27 Oktober 2024, hanya beberapa hari setelah pelantikan (Kompas.com, 2024). Dalam retret tersebut, para menteri dan wakil menteri mengenakan seragam loreng, mengikuti latihan baris-berbaris, olahraga pagi pukul 04.30 WIB, hingga menerima pembekalan materi kenegaraan dari sejumlah pejabat, termasuk materi pemberantasan korupsi dan strategi program prioritas pemerintahan (Tempo.co, 2024). Secara struktural-organisasional, langkah ini menunjukkan bagaimana Prabowo Subianto mentransplantasikan mekanisme sosialisasi institusional militer, yang lazim digunakan untuk membangun kohesi dan kepatuhan korps, ke dalam proses pembentukan tim kerja kabinet sipil.

Dari perspektif kepemimpinan transformasional, retret ini dapat dibaca sebagai upaya membangun visi bersama dan loyalitas kolektif di antara para pembantu presiden melalui dimensi motivasi inspirasional dan pengaruh ideal, dua dari empat komponen inti kepemimpinan transformasional (Bass, 1985; Bass & Avolio, 1994), sejalan dengan penekanan Prabowo Subianto bahwa kabinetnya harus bekerja sama layaknya sebuah tim yang solid untuk mencapai satu tujuan kemenangan bersama. Namun demikian, penggunaan simbol dan ruang militer secara eksplisit untuk pembekalan pejabat sipil juga menyiratkan bagaimana batas antara institusi militer dan sipil dalam praktik pemerintahan Prabowo Subianto cenderung menjadi kabur pada level simbolik. Dalam kerangka Huntington (1957), fenomena ini lebih dekat pada

pola kontrol sipil subjektif, yaitu ketika kekuasaan sipil memaksimalkan pengaruhnya dengan menyerap nilai dan simbol militer ke ranah sipil, alih-alih pola kontrol sipil objektif yang menuntut pemisahan tegas profesi militer dari urusan pemerintahan sehari-hari. Temuan ini juga sejalan dengan catatan Gunawan (2017) bahwa kontrol sipil atas kebijakan pertahanan di Indonesia pasca Orde Baru masih diwarnai persilangan budaya organisasi antara ranah sipil dan militer, sebuah kecenderungan yang perlu dicermati agar tidak mengarah pada militerisasi tata kelola pemerintahan sipil.

Asertivitas Otoritas Tunggal: Pernyataan "Bukan Presiden Boneka"

Klaster kedua berkaitan dengan dimensi komunikatif kepemimpinan Prabowo Subianto, sebagaimana tampak dalam pernyataannya di hadapan Sidang Kabinet Paripurna pada 5 Mei 2025. Menanggapi isu "matahari kembar" yang berkembang di ruang publik terkait dugaan pengaruh Presiden ke-7 Joko Widodo terhadap pengambilan keputusannya, Prabowo Subianto secara tegas membantah anggapan tersebut sebagai presiden boneka yang dikendalikan lewat telepon setiap malam (Fajar.co.id, 2025). Ia menegaskan bahwa konsultasi yang dilakukannya dengan para presiden terdahulu, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri, merupakan bagian dari kebijaksanaan kepemimpinan, bukan bentuk subordinasi.

Gaya komunikasi lugas dan konfrontatif dalam menepis isu tersebut mencerminkan karakteristik komunikasi otoritatif yang lazim ditemukan pada pemimpin dengan latar belakang komando militer, yaitu kecenderungan menegaskan hierarki tunggal kekuasaan secara langsung tanpa ambiguitas. Sejumlah pengamat menilai penegasan tersebut sekaligus berfungsi sebagai

sinyal internal untuk memastikan loyalitas kabinet tegak lurus kepada presiden (Kompas.id, 2025). Pola ini relevan dengan temuan Soesilo (2014) bahwa aktor-aktor dengan latar belakang militer yang masuk ke ranah politik sipil di Indonesia cenderung memosisikan diri sebagai penjaga stabilitas dan kejelasan hierarki kekuasaan, sekaligus meredam persepsi terpecahnya otoritas politik di ruang publik. Di sisi lain, kesediaan Prabowo Subianto mengakui praktik konsultasi lintas generasi kepemimpinan nasional menunjukkan pula unsur akomodatif kepemimpinan sipil-demokratis, yakni penghormatan terhadap tradisi musyawarah dan preseden kenegarawanan alih-alih murni komando searah. Hal ini sejalan dengan argumen Kardi (2015) bahwa kematangan relasi sipil-militer yang demokratis turut ditentukan oleh sejauh mana pemimpin sipil, termasuk pemimpin dengan latar belakang militer, mampu menampilkan kepemimpinan kolektif dan tidak semata bertumpu pada otoritas tunggal.

Ekstensi Struktur Militer ke Ranah Kebijakan Sosial: Program Makan Bergizi Gratis

Klaster ketiga menyoroti dimensi kebijakan, khususnya keterlibatan struktur TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program andalan pemerintahan Prabowo Subianto sejak Januari 2025. Sebanyak 351 Komando Distrik Militer (Kodim) TNI Angkatan Darat, 14 Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, dan 41 Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara dilibatkan untuk mendukung pendistribusian dan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah (Tempo.co, 2025). Pemerintah mengklaim capaian signifikan berupa keterlibatan ribuan

dapur MBG yang menjangkau puluhan juta penerima manfaat serta menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru dalam waktu kurang dari satu tahun (Sekretariat Negara RI, 2025).

Pelibatan aparaturnya militer dan kepolisian dalam program gizi masyarakat ini merefleksikan pola kepemimpinan yang mengandalkan struktur komando dan kapasitas logistik militer untuk memastikan eksekusi kebijakan berjalan cepat dan terukur, sebuah ciri khas kepemimpinan yang berorientasi hasil (result-oriented) sebagaimana ditekankan dalam kerangka kepemimpinan transformasional (Bass, 1985). Namun, dari perspektif relasi sipil-militer, praktik ini juga menuai kritik akademik. Fenomena penempatan personel dan struktur militer pada ranah kebijakan teknis sipil bukanlah hal baru dalam politik Indonesia pascareformasi; Syahrul dan Goncing (2020) mencatat bahwa penempatan prajurit TNI pada jabatan-jabatan sipil terus berlanjut meski bertentangan dengan semangat reformasi TNI yang membatasi wilayah kerja militer pada aspek pertahanan semata. Mietzner (2012) turut mengingatkan bahwa kualitas kontrol sipil atas militer di Indonesia bersifat volatil secara institusional, sehingga pelibatan struktur komando dalam program sosial berskala nasional berpotensi membalikkan arah marginalisasi politik militer yang telah dicapai pascakonsolidasi demokrasi 2004. Kekhawatiran ini diperkuat oleh tingginya angka kasus keracunan pada pelaksanaan program tersebut sepanjang 2025-2026, yang menurut sejumlah pemantau kebijakan mengindikasikan kesenjangan antara kapasitas komando militer untuk eksekusi cepat dan kapasitas teknis-keahlian yang dibutuhkan dalam tata kelola gizi masyarakat (Kanal Perspektif, 2026). Temuan ini menegaskan

proposisi Gunawan (2017) bahwa pendekatan komando yang efektif untuk kecepatan eksekusi tidak selalu berbanding lurus dengan akuntabilitas teknis yang dituntut dalam tata kelola kebijakan sosial di ranah sipil.

Dari Konfrontasi ke Akomodasi: Rekonsiliasi Politik dan Diplomasi Personal

Klaster keempat mengungkap dimensi adaptif kepemimpinan Prabowo Subianto yang menandai pergeserannya dari pola relasi konfrontatif khas kontestasi elektoral menuju sikap akomodatif kenegarawanan. Setelah tiga kali kalah dalam pemilihan presiden melawan Joko Widodo, Prabowo Subianto memilih bergabung ke dalam kabinet rival politiknya sebagai Menteri Pertahanan pada 2019, sebuah langkah rekonsiliasi yang dinilai berperan meredakan polarisasi politik nasional pascapemilu (Media Indonesia, 2025). Pola akomodasi serupa berlanjut ketika, sebagai presiden terpilih, ia melakukan lawatan diplomasi personal ke lebih dari dua puluh negara dalam enam bulan sebelum pelantikan, termasuk pertemuan langsung dengan sejumlah kepala negara dunia (VOA Indonesia, 2024).

Kombinasi antara ketegasan komando yang dipertahankan dalam relasi internal kabinet dan keluwesan akomodatif dalam relasi eksternal-politik ini menggambarkan proses adaptasi kepemimpinan yang khas pada figur militer yang bertransisi ke arena kepemimpinan sipil-demokratis. Pola ini konsisten dengan temuan kajian terdahulu bahwa Prabowo Subianto menampilkan perpaduan gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional sekaligus, dengan penekanan pada loyalitas struktural di satu sisi dan kemampuan membangun jejaring politik yang inklusif di sisi lain (Rengifurwarin, 2014; Husain, 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap empat klaster peristiwa kepemimpinan Prabowo Subianto pada awal masa pemerintahannya, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinannya merepresentasikan model kepemimpinan transisional yang memadukan warisan komando militer dengan tuntutan kepemimpinan sipil-demokratis, sebagaimana diprediksi oleh kerangka kepemimpinan transformasional (Bass, 1985; Bass & Avolio, 1994) dan konsep relasi sipil-militer (Huntington, 1957). Warisan militer tampak nyata pada penekanan disiplin dan kohesi kolektif dalam pembentukan tim kabinet, gaya komunikasi otoritatif yang menegaskan hierarki tunggal kekuasaan, serta pengerahan struktur TNI dan Polri untuk mengeksekusi program kebijakan sosial secara cepat dan terukur. Di sisi lain, unsur adaptasi menuju kepemimpinan sipil tampak pada keterbukaan terhadap konsultasi lintas generasi kepemimpinan nasional, kesediaan menghadapi kritik publik atas isu independensi kekuasaan, dan kemampuan membangun rekonsiliasi politik lintas kubu yang pernah berseberangan dengannya, sebuah pola yang konsisten dengan temuan Soesilo (2014) mengenai peran purnawirawan militer sebagai agen peredam konflik sipil-militer di Indonesia. Dengan demikian, kepemimpinan Prabowo Subianto tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai kelanjutan pola komando militeristik semata, melainkan sebagai proses adaptasi berkelanjutan yang tetap menyisakan sejumlah persoalan batas kewenangan sipil-militer, khususnya terkait perluasan peran aparatur keamanan pada ranah kebijakan teknis sipil sebagaimana dikhawatirkan Mietzner (2012), Gunawan (2017), dan Syahrul serta Goncing (2020). Temuan ini menegaskan relevansi kelanjutan agenda riset relasi sipil-militer Indonesia dalam membaca praktik kepemimpinan

nasional pascareformasi, sekaligus menjadi bagian dari diskursus akademik mengenai konsolidasi demokrasi Indonesia ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (1st ed.). Rineka Cipta.
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. Free Press.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership*. Sage Publications.
- Fajar.co.id. (2025, 6 Mei). Tegas di Sidang Kabinet, Prabowo: Saya Bukan Presiden Boneka. <https://fajar.co.id/2025/05/06/tegas-di-sidang-kabinet-prabowo-saya-bukan-presiden-boneka/>
- Gunawan, A. B. (2017). Kontrol Sipil atas Militer dan Kebijakan Pertahanan di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Politik*, 2(2), 1–34. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.117>
- Husain, M. N. (2025). Analisis perubahan strategi komunikasi politik Prabowo Subianto dalam Pemilu 2019 dan 2024. *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 3(1), 20–28.
- Huntington, S. P. (1957). *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Kanal Perspektif. (2026, 8 April). Kala TNI dan Polri Mengurus Makanan Bergizi Gratis (MBG). <https://www.kanalperspektif.com/2026/04/kala-tni-dan-polri-mengurus-makanan-bergizi-gratis-mbg.html>
- Kardi, K. (2015). Demokratisasi Relasi Sipil–Militer pada Era Reformasi di Indonesia. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 19(2). <https://doi.org/10.7454/mjs.v19i2.4703>
- Kompas.com. (2024, 28 Oktober). Istana: Retret Menteri di Akmil Magelang Dibiayai Uang Prabowo. <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/28/11513381/istana-retret-menteri-di-akmil-magelang-dibiayai-uang-prabowo>
- Kompas.id. (2025, 10 Mei). Orisinalitas Gaya Kepemimpinan Prabowo Subianto. <https://www.kompas.id/artikel/orisinalitas-gaya-kepemimpinan-prabowo-subianto/amp>
- Media Indonesia. (2025). Profil Lengkap Prabowo Subianto: Perjalanan Militer hingga Presiden RI. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/837145/profil-lengkap-prabowo-subianto-perjalanan-militer-hingga-presiden-ri>
- Mietzner, M. (2008). *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Mietzner, M. (2012). The political marginalization of the military in Indonesia: Democratic consolidation, leadership, and institutional reform. In M. Mietzner (Ed.), *The Political Resurgence of the Military in Southeast Asia: Conflict and Leadership* (pp. 126–147). Routledge.
- Rengifurwarin, Z. A. (2014). Analisis Gaya Kepemimpinan: Prabowo Subianto dan Joko Widodo. *Jurnal Populis*, 8(2).
- Sekretariat Negara RI. (2025). Program Makan Bergizi Gratis Sentuh 20 Juta Penerima, Ciptakan 290 Ribu Lapangan Kerja. <https://setneg.go.id/baca/index/program-makan-bergizi-gratis-sentuh-20-juta-penerima-ciptakan-290-ribu-lapangan-kerja>
- Soesilo, A. S. (2014). Jaringan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Politik Relasi Sipil–Militer Pasca Reformasi TNI. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 19(2). <https://doi.org/10.7454/MJS.v19i2.1245>
- Subianto, P. (2021). *Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman*. PT Media Pandu Bangsa.
- Subianto, P. (2022). *Kepemimpinan Militer* (Vol. 1–2). PT Media Pandu Bangsa.
- Syahrul, F., & Goncing, M. A. (2020). Analisis Keterlibatan Militer dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 di Indonesia. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2).
- Tempo.co. (2024, 27 Oktober). Retreat Menteri Prabowo di Akmil Magelang Selesai, Materi yang Dibahas dari Pemberantasan Korupsi sampai Makan Bergizi Gratis. <https://www.tempo.co/politik/retreat-menteri->

[prabowo-di-akmil-magelang-selesai-materi-yang-dibahas-dari-pemberantasan-korupsi-sampai-makan-bergizi-gratis-1160931](#)

Tempo.co. (2025, 1 Januari). Serba-serbi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis: Dimulai Pekan Depan hingga Pendistribusian Dibantu TNI. <https://www.tempo.co/ekonomi/serba-serbi-pelaksanaan-makan-bergizi-gratis-dimulai-pekan-depan-hingga-pendistribusian-dibantu-tni-1189156>

VOA Indonesia. (2024, 18 Oktober). Akankah Prabowo Subianto Jadi Presiden 'Kebijakan Luar Negeri'? <https://www.voaindonesia.com/a/akankah-prabowo-subianto-jadi-presiden-kebijakan-luar-negeri-/7827966.html>